

LAKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024

INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LKIP DAN DOKUMEN AKIP INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

TAHUN ANGGARAN 2024

Kami Tim Kerja Peningkatan Nilai SAKIP (TKPNS) Provinsi Gorontalo selaku fasilitator telah mereviu Laporan Kinerja dan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja dan dalam dokumen akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Gorontalo, 12 Maret 2025

Fasilitator

Yalfiet Tobias Tamonoku, S.Pd. M.Pd

NIP. 19720106200903100l

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah subhana wata'ala atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dalam pencapaian Rencana Strategis Tahun 2023-2026. Laporan ini juga merupakan sumber informasi daerah perbaikan serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Capaian kinerja Tahun 2024 ini merupakan salah satu masukan bagi kegiatan ditahun berikutnya untuk menjadi lebih efektif dan efisien baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya dalam membangun sistem pengawasam secara komprehensif dan berkesinambungan.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam pelaksanaan program maupun dalam menyusun laporan ini, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan/program ke depan. Dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Gorontalo, 2025

I N S P E K T U R

Ditandatangani secara elektronik oleh :
INSPEKTUR

ZUKRI SUROTINOJO, AP, M.Ec.Dev

yang diterbitkan oleh BSrE.

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar v
Daftar Grafik vi
Ringkasan Eksekutif vii

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Struktur Organisasi 2
1.4. Tugas dan Fungsi 3
1.5. Isu Strategis 4
1.6. Keadaan Pegawai 5
1.7. Keadaan Sarana dan Prasarana 7
1.8. Anggaran Keuangan 9
1.9. Sistematika Penyusunan 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis 12
2.2. Rencana Anggaran Tahun 2024 14
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 16
2.4. Instrumen Pendukung 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo 21
3.2. Realisasi Anggaran 35

BAB IV PENUTUP 40

Lampiran

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Data Pegawai Berdasarkan Jabatan	5
Tabel 1.2	Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan	5
Tabel 1.3	Data Pegawai Berdasarkan Golongan	6
Tabel 1.4	Data Sarana dan Prasarana yang Tersedia	7
Tabel 1.5	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024	9
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026	13
Tabel 2.2	Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 -2026	13
Tabel 2.3	Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024	14
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	16
Tabel 2.5	Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2024	17
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	21
Tabel 3.2	Pengukuran Perencanaan Kinerja Tahun 2024	22
Tabel 3.3	Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas Tahun 2024	23
Tabel 3.4	Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Provinsi Gorontalo Hingga Tahun 2024	25
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 - 2024	25
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian MCP Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2024	26
Tabel 3.7	Hasil Penilaian Akuntabilitas Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2024	26
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target RPD 2023 - 2026	27
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo sampai dengan Tahun 2024 dalam Dokumen Renstra	27
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo sampai dengan Tahun 2024 dengan Standar Nasional	28
Tabel 3.11	Analisis Efisiensi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024	31
Tabel 3.12	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun 2024	32
Tabel 3.13	Capaian Persentase Kewajiban Setor yang telah ditindaklanjuti sejak 5 Tahun terakhir	33
Tabel 3.14	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan Tahun 2024	33
Tabel 3.15	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tahun 2024	35
Tabel 3.16	Serapan Anggaran Belanja Tahun 2024	37

Tabel 3.18 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024 39

Tabel 3.19 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Program pada Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 39

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo 3
Gambar 2.1 Tampilan Aplikasi Silet Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo 18
Gambar 2.2 Tampilan Layanan Halo Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo 18
Gambar 2.3 Tampilan Aplikasi Sipd Kemendagri 19
Gambar 2.4 Tampilan Aplikasi New-Siransija Provinsi Gorontalo 19
Gambar 2.5 Tampilan Aplikasi Si-Dalev 20

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1.1 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 6
Grafik 1.2 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD 7

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Secara keseluruhan capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024 dinyatakan berhasil karena capaian dari sasaran strategis rata-rata 100% sesuai indikator target yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% (realisasi/target)
Tujuan Strategis :	Terwujudnya *Good and Clean Government*			
Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintah OPD	Jumlah Fungsional Auditor dan PPUPD yang Bersertifikat Profesi	2	2	100
	Nilai LKIP Inspektorat	BB	BB	100
Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kualitas Pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	100
	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	100
	Manajemen Risiko Indeks	Level 3	Level 3	100
	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Level 3	Level 3	100

Demi mewujudkan *Clean and Good Government* diperlukan peningkatan pengawasan, dan pembinaan serta kerja sama dengan instansi Pusat maupun Daerah yang lebih intensif. Dan untu mendukung capaian kinerja pada tahun 2024 telah direalisasikan anggaran yang bersumber dari APBD sebagai berikut :

Anggaran	2024			
	Target	Realisasi	Sisa	%
Belanja Pegawai	15,835,664,161	15,545,127,130	290,537,031	98.17
Belanja Barang dan Jasa	6,511,071,163	6,419,348,755	91,722,408	98.59
Belanja Modal	757,036,000	735,900,000	21,136,000	97.21

Yang apabila disandingkan dengan rata-rata capaian sasaran yang mencapai 100%, menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan LAKIP oleh setiap Perangkat Daerah sebagai bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan lain yang mengamanatkan penyusunan LAKIP adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjabarkan 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu *Input, Output, dan Outcome*. Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo.
2. Mendorong Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo didalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan, Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo mengacu pada landasan hukum, antara lain :

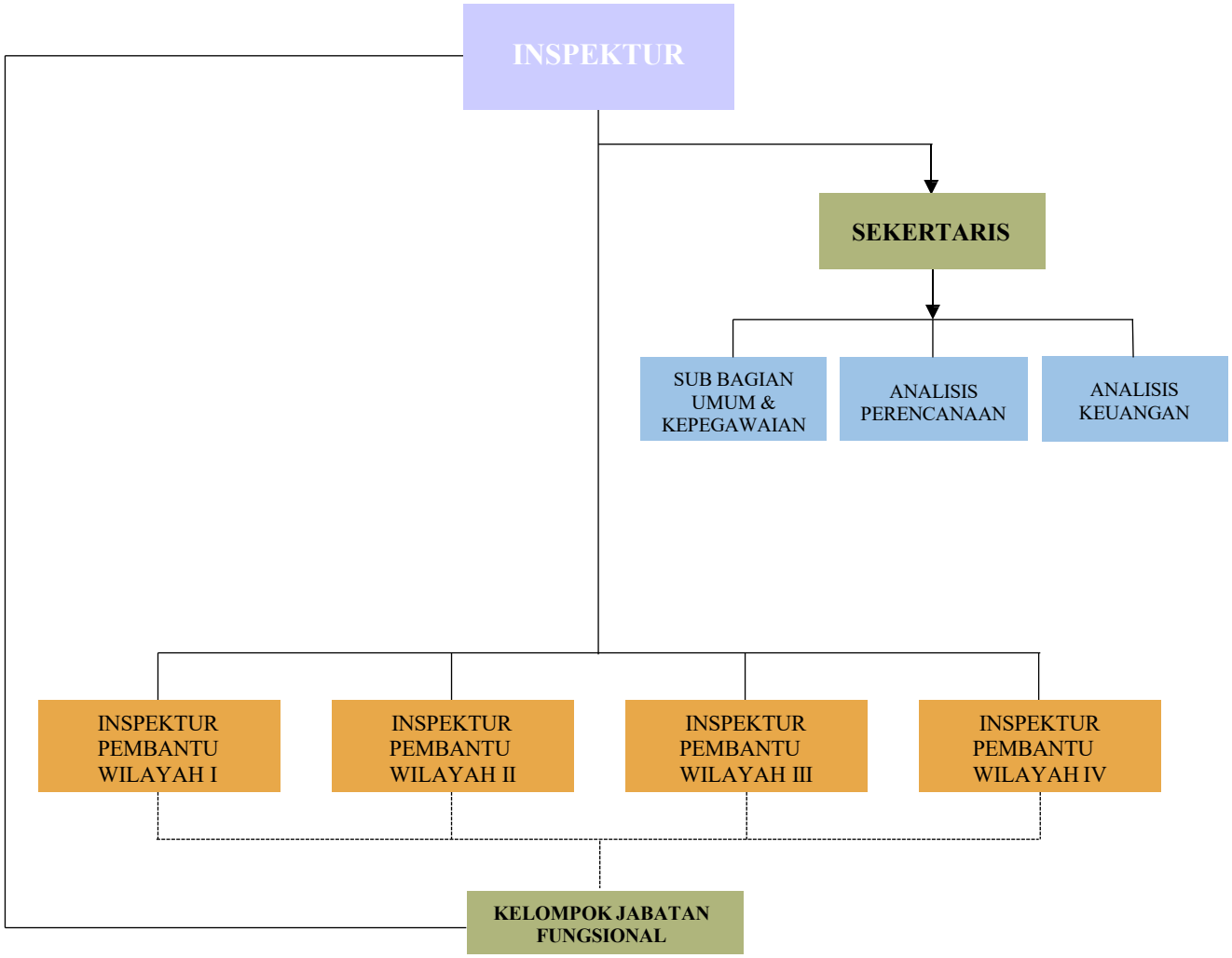
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 06);
7. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah yang bertanggungjawab kepada Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Gorontalo dibidang pegawasan. Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

1. Inspektur,
2. Sekertariat, terdiri dari :
   2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   2.2. Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
   2.3. Fungsional Analisis Perencana
3. Inspektur Pembantu wilayah I, II, III, dan IV
4. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo



1.4. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai tugas pokok yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan didaerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan didaerah kabupaten/kota.

2. Fungsi

   Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

   a. Merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang pengawasan;
   b. Menyusun rencana dan program dibidang pengawasan;
   c. Melaksanakan pengendalian teknis operasional pengawasan; dan
   d. Melaksanakan koordinasi pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

1.5. Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu mengenali dan merespon isu strategis dengan kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Adapun isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis dirumuskan dengan didahului rumusan permasalahan yang terjadi, yang kemudian dijadikan fokus tindaklanjut penyelesaian sebagai tugas. Adapun isu strategis Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

1. Adanya tuntutan untuk meningkatkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Provinis Gorontalo;
2. Harapan masyarakat yang sangat tinggi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Tuntutan percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinis Gorontalo;
4. Tuntutan peningkatan terhadap kapabilitas APIP;
5. Adanya tuntutan Inspektorat Daerah sebagai katalisator di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Dari rumusan masalah di atas, dapat dirumuskan isu strategis di Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Perlunya meningkatkan pelaksanaan dan pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Provinis Gorontalo;
2. Perlunya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Perlunya melaksanakan percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
4. Perlunya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas APIP;
5. Perlunya meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah sebagai katalisator di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

1.6. Keadaan Pegawai

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo didukung oleh personel/ sumber daya manusia dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

STRUKTURAL			FUNGSIONAL				Jumlah
			Auditor	PPUPD	Analis Keuangan Pusat & Daerah	Umum	
Eselon II	Eselon III	Eselon IV					
1	5	1	53	29	1	20	110

Sumber : Daftar Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Tabel 1.2
Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Uraian	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SMA	D3	S1	S2	S3	
1	Inspektur	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	12	1	6	4	-	23
3	IRBAN I	-	2	11	10	-	23
4	IRBAN II	-	1	12	6	1	20
5	IRBAN III	-	2	13	7	-	22
6	IRBAN IV	-	-	12	9	-	21
JUMLAH		**12**	**6**	**54**	**37**	**1**	**110**

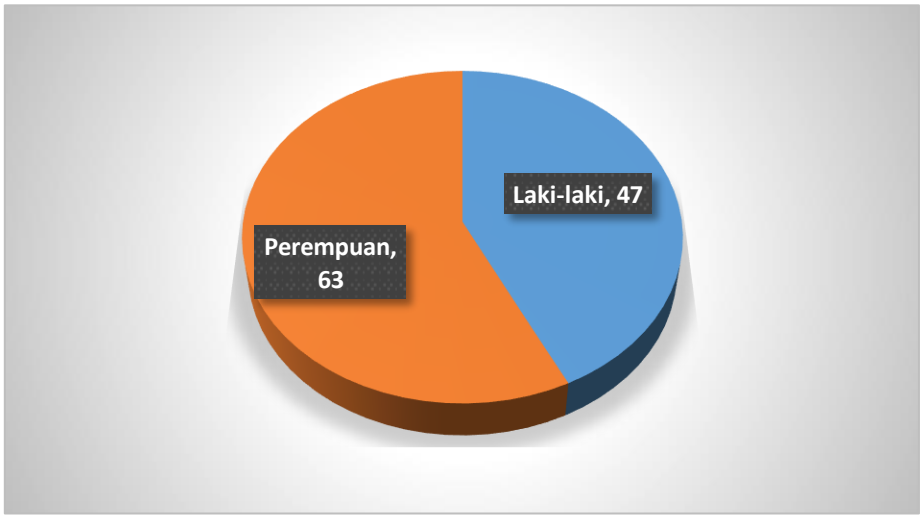
Sumber : Daftar Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Tabel 1.3
Data Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Struktural	-	-	1	6	7
2	Fungsional Auditor Madya	-	-	-	12	12
3	Fungsional PPUPD Madya	-	-	-	7	7
4	Fungsional Auditor Muda	-	-	18	1	19
5	Fungsional PPUPD Muda	-	-	11	1	12
6	Fungsional Auditor Pertama	-	-	15	-	15
7	Fungsional PPUPD Pertama	-	-	10	-	10
8	Fungsional Auditor Pelaksana Lanjutan	-	-	3	-	3
9	Fungsional Auditor Pelaksana	-	3	1	-	4
10	Fungsional PPUPD Pelaksana	-	-	-	-	-
11	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah	-	-	1	-	1
12	Fungsional Umum	-	8	10	2	20
JUMLAH		**-**	**11**	**70**	**29**	**110**

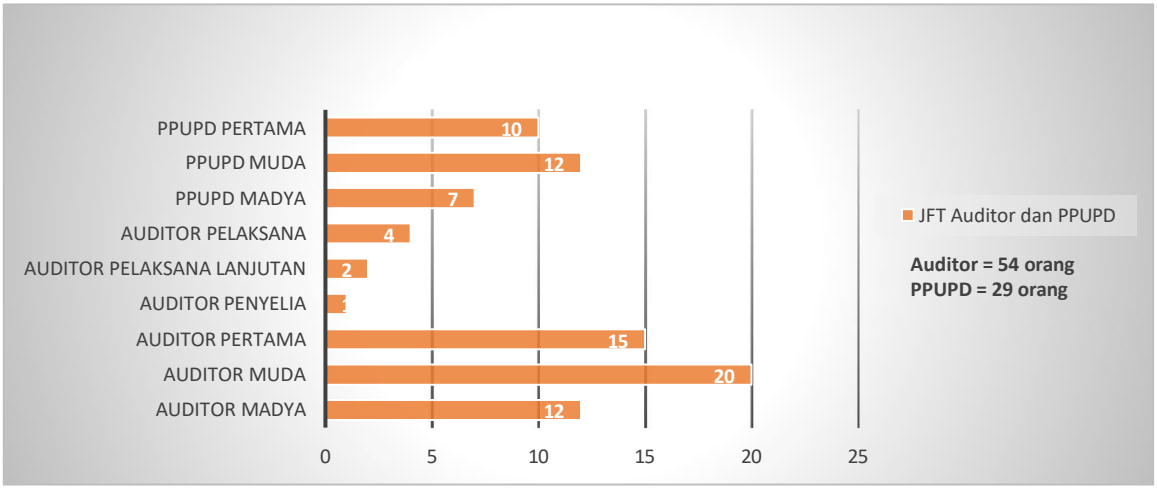
Sumber : Daftar Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Grafik 1.1
Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Daftar Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Grafik 1.2
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD



Sumber : Daftar Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024

1.7. Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Dalam hal ini tentunya yang dapat menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsinya. Dengan meningkatnya urgensitas serta bertambahnya jumlah pegawai, fasilitas yang tersedia sudah cukup memadai. Kondisi sarana dan prasarana berupa gedung kantor, ditambah dengan beberapa ruang rapat sebagai sarana penerimaan tamu dari luar maupun dalam kantor, juga Aula yang cukup besar sebagai tempat rapat-rapat maupun pelaksanaan Bimtek dan evaluasi bersama perangkat daerah lainnya.

Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada pada Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Data Sarana dan Prasarana yang tersedia

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
1	Tanah Bangunan Kantor	2.629 m²	Belum ada sertifikat
2	Lemari Penyimpan	1 buah	
3	Filing Cabinet Besi	7 buah	
4	Meja Rapat	16 buah	
5	Meja ½ Biro	26 buah	
6	AC Split	2 buah	
7	Facsimile	3 buah	
8	Sepeda Motor	4 buah	DM 3019 AZ DM 6975 AZ DM 6976 AZ DM 6974 AL
9	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis		
10	Peralatan Mainframe Lainnya	1 Paket	Program Website
11	Station Wagon	5 buah	DM 201 DM 20

			DM 200 DM 202 DM 203
12	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	3 buah	
13	Lemari Kayu	19 buah	
14	Brandkas	1 buah	
15	Meja Kerja Kayu	30 buah	
16	Mesin Fotocopy Folio	2 buah	
17	Display	1 buah	
18	Kursi Besi/Metal		
19	Kursi Rapat		
20	Sofa	6 Set	
21	Televisi	5 Buah	
22	Camera Film		
23	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5 buah	
24	Sound Sistem	1 buah	
25	Printer (Peralatan Personal Komputer)	15 Buah	
26	Mesin Ketik Manual Standar	2 buah	
27	Meja Rapat	6 buah	
28	Kursi Tamu		
29	Lemari Es	4 buah	
30	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 buah	
31	Jam Mekanis	1 buah	
32	Loudspeaker	1 set	
33	Dispenser	2 buah	
34	Gordyin/Kray	2 set	
35	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	11 buah	
36	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6 buah	
37	Buffet Kayu	5 buah	
38	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5 buah	
39	White Board	2 buah	
40	Alat Penghancur Kertas	2 buah	
41	Slide Projector	2 buah	
42	PC Unit	12 buah	
43	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	26 buah	
44	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	2 buah	DM 204 DM 205
45	Laptop	2 buah	
46	Lemari Besi/Metal	1 Set	Rak/Lemari Untuk Server e-TLHP
47	Microphone/Wireless MIC	3 buah	
48	Meja Resepsionis	1 Set	
49	Server		Server e-TLHP
50	Air Conditioning (AC)	10 buah	
51	LCD Projector/Infocus	4 buah	
52	Layar Proyektor	3 buah	
53	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1114 m²	
54	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	111 m²	Swakelola (Mushollah)
55	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50 m²	Bangunan Pagar
56	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	284 m²	Penataan Halaman Kantor
57	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	800 m²	Penataan Halaman Kantor
58	Bangunan Gedung Kantor Permanen	36 m²	Gedung Arsip dan Perpustakaan
59	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	5625 m²	Renovasi Tempat Parkir Kantor
60	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	370 m²	Penataan Halaman Kantor (Paving Blok)
61	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	48 Buah	

Sumber : Daftar BMD pada Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Sarana dan prasarana yang tersedia baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak tersebut, merupakan fasilitas pendukung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang pengawasan dirasa sudah cukup memadai.

1.8. Anggaran Keuangan

Dukungan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo pada Tahun 2024 berasal dari APBD Provinsi Gorontalo. Pada tahun anggaran 2024 Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo memiliki 3 Program, 10 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran pada anggaran induk sebesar Rp 21.326.771.324,- dan pada perubahan anggaran sebesar Rp 23.103.771.324,- dengan rincian sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.5
Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024

No.	Program / Kegiatan	Anggaran Perubahan 2024 (Rp)
A.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**19.012.602.424**
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	259.098.775
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	186.785.350
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.313.425
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.924.734.461
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.835.664.161
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.754.300
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	36.316.000
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	415.060.550
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	415.060.550
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	947.291.600
4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	947.291.600
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.119.811.950
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	248.248.650
5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	352.548.300
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	519.015.000
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	346.605.088
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.750.000
6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.410.000
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	237.445.088

B.	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**2.662.816.900**
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.199.894.025
1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	453.699.400
1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	219.528.200
1.3	Reviu Laporan Kinerja	528.940.000
1.4	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	222.280.100
1.5	Kerjasama Pengawasan Internal	400.000.000
1.6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	375.446.325
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	462.922.875
2.1	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	462.922.875
C.	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**	**1.428.352.000**
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	209.790.000
1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	209.790.000
2	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	1.218.562.000
2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	381.282.650
2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	140.138.000
2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	380.994.600
2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	316.146.750
J U M L A H		**23.103.771.324**

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo TA. 2024

1.9. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Tahun 2024 adalah :

Ringkasan Eksekutif

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.
2. Disebutkan pula langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Adapun susunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum dan sistematika penyusunan laporan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu, penjabaran visi dan misi, tujuan dan sasaran, kebijakan program, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV. PENUTUP

Meliputi tinjauan secara umum dengan mengemukakan kebrhasilan/ kegagalan, permasalahan/ kendala yang berkaitan dengan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Renstra ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, dimana tahun 2024 merupakan tahun kedua dari rencana jangka menengah pemerintah Provinsi Gorontalo. Renstra Inspektorat Daerah merupakan manifestasi komitmen Inspektorat Daerah dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Gorontalo yang tertuang dalam RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, yang merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

1. Visi dan Misi

   Sebagaimana visi yang tertuang dalam RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 "Gorontalo Maju dan Mandiri", maka Inspektorat selaku APIP mengemban tanggung jawab melaksanakan :

   Misi ke – 3 : Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah
   Tujuan ke – 1 : Terwujudnya *Good and Clean Government*
   Indikator Tujuan : - Nilai MCP (%)
   - Indeks Reformasi Birokrasi
   Sasaran ke – 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

   Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan bidang pengawasan pengelolaan Pemerintahan Daerah, selanjutnya yang menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo adalah tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026. Inspektorat sebagai salah satu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mengembang salah satu tujuan yaitu

Terwujudnya *Good and Clean Government* dan sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, penjelasan tujuan tersebut ditampilkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 -2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Sasaran			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Jumlah Fungsional Auditor dan PPUPD yang Bersertifikat Profesi	2	2	2	2
		Nilaik LKIP Inspektorat	BB	BB	BB	BB
	Percepatan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kualitas pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Manajemen Risiko Indeks	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo 2023-2026

3. Sasaran dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai, strategi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan
Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 -2026

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintah OPD	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran, Penatausahaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi Pengawasan	Peningkatan Kapasitas SDM Aparat Pengawasan
		Peningkatan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan

		Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Berbasis Elektronik
Percepatan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kualitas pengawasan	Peningkatan Kualitas Pengawasan	Peningkatan Penyelenggarana Pengawasan
		Peningkatan pelaksanaan Pembanguna Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrsai Bersih dan Melayani (WBBM)
		Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan, Pendampingan dan Asistensi pada Perangkat Daerah
		Peningkatan Kualitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah
		Peningkatan Manajemen Risiko Indeks Perangkat Daerah
		Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo 2023-2026

2.2. Rencana Anggaran Tahun 2024

Rencana Kerja Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
Pengawasan				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**18.930.000.000**	**APBD**
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi**	**9**	**250.000.000**	**APBD**
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	150.000.000	APBD
b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	100.000.000	APBD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah**	**95**	**16.025..000.000**	APBD
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104	15.900.000.000	APBD
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	700	75.000.000	APBD
c. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	50.000.000	APBD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	**35**	**650.000.000**	APBD
a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35	650.000.000	APBD

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**15**	**700.000.000**	APBD
a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	700.000.000	APBD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**2**	**730.000.000**	APBD
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	230.000.000	APBD
b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	190.000.000	APBD
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	500.000.000	APBD
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	**57**	**575.000.000**	APBD
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6	300.000.000	APBD
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	75.000.000	APBD
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	200.000.000	APBD
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase Penyelesaian Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK	**80**	**3.600.000.000**	APBD
	Prosentase Penyelesaian Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP	**90**		APBD
1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan PengawasanInternal	**205**	**3.100.000.000**	APBD
a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	95	750.000.000	APBD
b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	60	400.000.000	APBD
c. Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	26	550.000.000	APBD
d. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	24	550.000.000	APBD
e. Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1	400.000.000	APBD
f. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3	450.000.000	APBD
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**12**	**500.000.000**	APBD
a. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	12	500.000.000	APBD
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah OPD yang Menerpakan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM	**2**	**1.650.000.000**	APBD
1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	**1**	**350.000.000**	APBD

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	350.000.000	APBD
2. Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi	**33**	**1.300.000.000**	APBD
a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	15	250.000.000	APBD
b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	33	350.000.000	APBD
c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	33	350.000.000	APBD
d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	33	350.000.000	APBD

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo 2023-2026

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, dapat terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintah OPD	Jumlah Fungsional Auditor dan PPUPD yang Bersertifikat Profesi	2
	Nilai LKIP Inspektorat	BB
Percepatan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kualitas pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3
	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3
	Manajemen Risiko Indeks	Level 3
	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Level 3

Sumber : Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo 2024

Dalam mewujudkan Target Kinerja Tahun 2024 tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo mendapat dukungan APBD sebesar Rp 21.326.771.324,- yang digunakan untuk melaksanakan 3 program 10 kegiatan dan 25 sub kegiatan, dan pada bulan Oktober terjadi rasionalisasi pada Perubahan Anggaran yang ditetapkan dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran. Namun hal ini tidak berdampak pada perubahan target kinerja maupun indikator kinerja di Tahun 2024. Anggaran yang ditetapkan pada Perubahan APBD tersebut sebesar Rp 23.103.771.324,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5
Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)		Selisih (Rp)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintah OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	18.371.906.774	19.012.602.424	640.695.650
Percepatan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kualitas pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.866.801.700	2.662.816.900	796.015.200
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.088.062.850	1.428.352.000	340.289.150
J U M L A H		**21.326.771.324**	**23.103.771.324**	**1.777.000.000**

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo 2024

2.4. Instrumen Pendukung

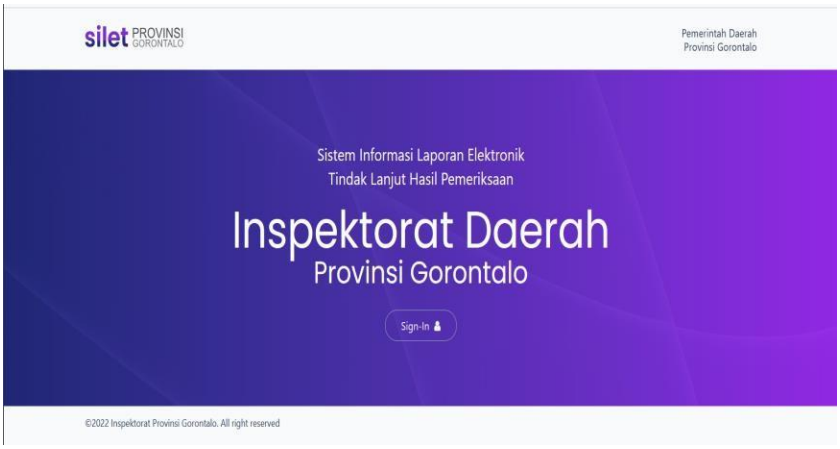
Dalam rangka mencapai target kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024, digunakan instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dalam bidang pengawasan daerah dengan memaksimalkan penggunaan sistem informasi yang telah dibangun pada tahun sebelumnya. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus dapat dimanfaatkan secara tepat, terbuka dan transparan kepada masyarakat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Gorontalo. Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo selalu berbenah untuk mengikuti perkembangan teknologi dalam upaya peningkatan kinerjanya, baik yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo maupun sistem informasi yang dikembangkan oleh Inspektorat Daerah itu sendiri.

1. Sistem Informasi Elektronik Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SiLET)

   Aplikasi SilET atau Sistem Informasi Elektronik Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SiLET) merupakan sebuah sistem aplikasi internal Inspektorat Daerah yang membantu APIP dalam

memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pengawasan serta memuat proses awal dari sebuah pengawasan sampai dengan laporan dari hasil tindak lanjut, baik rekomendasi administrasi maupun TGR.

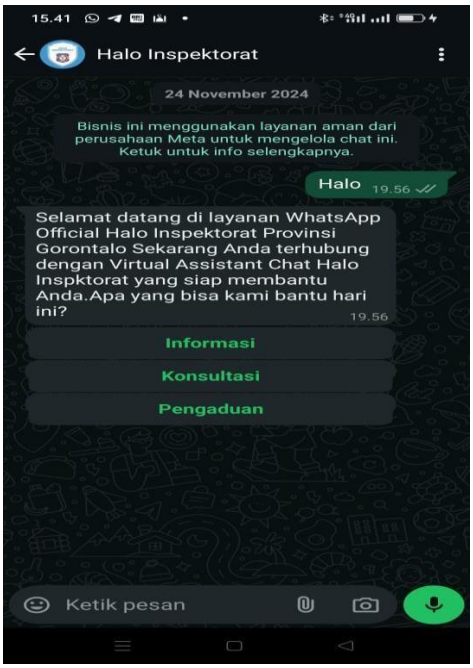
Gambar 2.1
Tampilan Aplikasi SilET Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo



2. Halo Inspektorat

Halo Inspektorat adalah layanan konsultasi yang cepat, efektif dan terintegrasi yang bertujuan untuk menjawab kebutuhan serta memberikan pendampingan komprehensif dalam bidang pengawasan dan pembinaan. Layanan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan layanan, serta mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

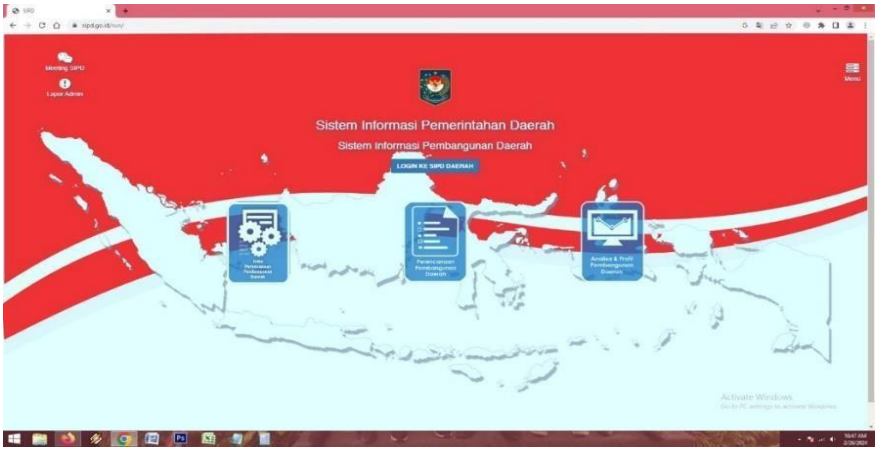
Gambar 2.2
Tampilan Layanan Halo Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo



3. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah sebuah sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. SIPD memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.

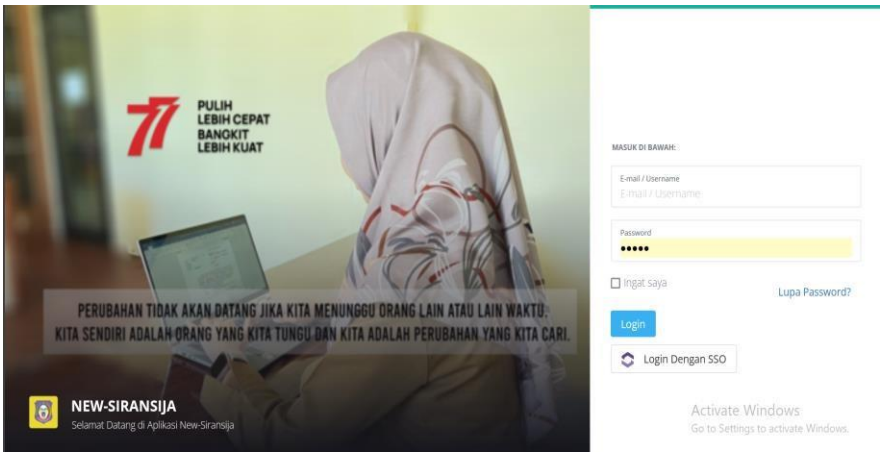
Gambar 2.3
Tampilan Aplikasi SIPD Kemedagri



4. Sistem Informasi Pengukuran Prestasi Kerja (Siransija)

Pemerintah Provinsi Gorontalo menerapkan Sistem Pengukuran Prestasi Kerja (Siransija) ASN menggunakan 3 (tiga) unsur dalam Revolusi Mental yaitu Integritas, Etos Kerja dan Gotong Royong. Nilai yang diperoleh dari Aplikasi ini digunakan sebagai dasar perhitungan pemberian Tunjangan.

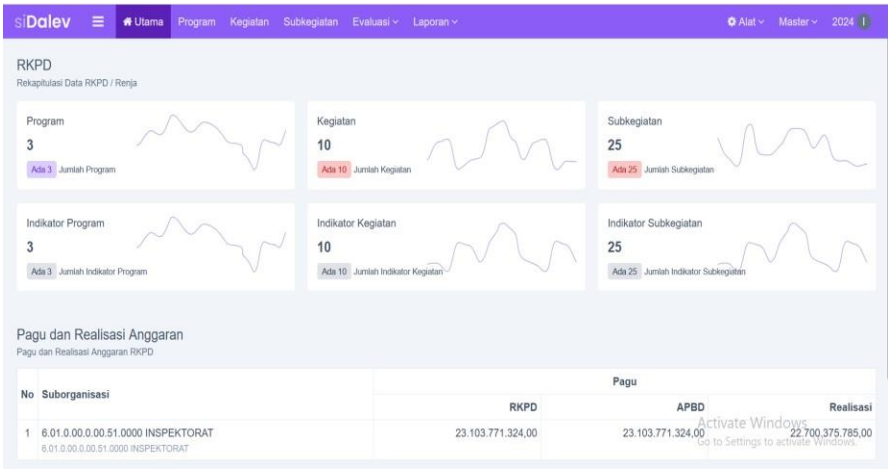
Gambar 2.4
Tampilan Aplikasi New-Siransija Provinsi Gorontalo



5. Sistem Pelaporan Kinerja Pembangunan Daerah (Si-Dalev)

Si-Dalev adalah suatu sistem pelaporan pengendalian dan eva;luasi kinerja pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dapat menjamin kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu memberikan kemudahan dalam memberikan catatan dan rekomendasi secara institusi dan waktu yang dubutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi bisa lebih cepat, serta terdokumentasi dengan baik.

Gambar 2.5
Tampilan Aplikasi Si-Dalev



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo

Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini berpedoman pada Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perwal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, dan Perwal Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengumpulan data untuk penyusunan LAKIP selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja berdasarkan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021, yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Kriteria	Interval Realisasi	Kode
1	Sangat Baik	91 (= 100	Hijau Tua
2	Tinggi	76 (= 90	Hijau Muda
3	Sedang	66 (= 75	Kuning Tua
4	Rendah	51 (= 65	Kuning Muda
5	Sangat Rendah	(= 50	Merah

Sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo dalam mencapai target dan sasaran strategisnya, dapat dijelaskan dengan capaian Indikator Kinerja, yaitu :

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing

indikator kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut disajikan pada tabel pengukuran kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Perencanaan Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% (realisasi/target)	Kriteria/ Kode
Tujuan Strategis :	Terwujudnya *Good and Clean Government*				
Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintah OPD	Jumlah Fungsional Auditor dan PPUPD yang Bersertifikat Profesi	2	2	100	
	Nilai LKIP Inspektorat	BB	BB	100	
Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kualitas Pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	100	
	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	100	
	Manajemen Risiko Indeks	Level 3	Level 3	100	
	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Level 3	Level 2	66,7	

Pencapaian kinerja terhadap setiap sasaran strategis sebagaimana pada tabel 3.2 dapat dijelaskan pada analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Analisis Capaian Kinerja

a. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :

(1) Jumlah Fungsional Auditor dan PPUPD yang bersertifikat profesi memiliki target indikator pada tahun 2024 adalah 2 orang dengan realisasi 2 orang atau sebesar 100%.

(2) Nilai LKIP Inspektorat memiliki target indikator adalah BB dengan realisasi BB atau sebesar 100%.

b. Sasaran Strategis 2 : Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kualitas Pengawasan

Untuk mempercepat tata kelola pemerintahan yang baik dilakukan reformasi birokrasi dengan tujuan Terwujudnya *Good and Clean Government.* Reformasi birokrasi dalam bidang pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan

yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme *(clean government)*. Upaya reformasi birokrasi dalam bidang pengawasan tersebut selaras dengan perwujudan peran APIP yang efektif dalam Pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008, sekurang-kurangnya harus memenuhi :

(1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas, pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instasi pemerintah:
(2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
(3) memeliharan dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Dalam hal tersebut percepatan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo menetapkan 4 (empat) indikator kinerja sebagai berikut :

- Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

  Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

  Peningkatan kapabilitas merupakan upaya APIP untuk memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia, agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.

  Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor : PE.09.03/LHP-110/PW31/6/2024 tanggal 29 Juli 2024 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Gorontalo menyimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo berada pada Level 3 dengan skor 3,12 sebagaimana berikut:

Tabel 3.3
Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2024

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan *(Enabler)*			
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,54

2	Praktik Profesional	3	0,63
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,21
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5	Struktur Tata Kelola	3	0,36
Komponen Aktivitas Pengawasan *(Delivery)* dan Kualitas Pengawasan *(Result)*			
6	Peran dan Layanan	3	1,20
Simpulan Entitas		3	3,12

- Nilai Maturitas Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi

  Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo telah memenuhi karakteristik Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko Indeks pada Level 3 (Terdefinisi) sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D, yang memiliki arti bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mampu mendefinisikan kinerja dengan baik dan memiliki strategi pencapaian kinerja yang telah relevan dan terintegrasi, namun pengendalian yang telah dibangun dan dilaksanakan belum sepenuhnya efektif dalam memberikan keyakinan yang memadai atas ketercapaian tujuan telah ditetapkan.

  Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor : PE.09.03/LHP-146/PW31/3/2024 tanggal 12 September 2024 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Gorontalo pada Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2024, dapat diuraikan sebagai berikut :

  a) Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,428 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 3 (Terdefinisi);
  b) Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,372 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 3; dan
  c) Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) telah dilakukan penyesuaian kembali berdasarkan hasil panel validasi Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) oleh Deputi Bidang Investigasi dan penetapan hasil evaluasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP oleh Deputi Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah melalui Surat Nomor PE.09.03/S-543/D3/04/2024, sehingga yang semula sebesar 3,000 atau memenuhi

karakteristik IEPK pada Level 3 menjadi 2,558 atau memenuhi karakteristik IEPK pada Level 2. Penyesuaian nilai IEPK diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No.	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian	Hasil Evaluasi	Naik/ (Turun)
	Semula :			
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,995	3,428	(0,577)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,997	3,372	(0,625)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,108	3,000	(0,108)
	Menjadi :			
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,995	3,428	(0,577)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,997	3,372	(0,625)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,108	2,558	(0,550)

B. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu

Capaian kinerja pada tata kelola pemerintahan, ditunjukkan dengan nilai MCP atau *Monitoring Center for Prevention* untuk Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 dan Tahun 2024 masing-masing sebesar 87,50% dan 81,70% yang artinya mengalami penurunan sekitar 5,8%. Dapat dilihat pada masing-masing tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 – 2024

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)		Capaian (%)	
		2023	2024	2023	2024
Terwujudnya *Good and Clean Govenment*	Nilai MCP	83	94,10	81,50	81,70
	Indeks Reformasi Birokrasi	65,10	65,70	69,61	77,75

Dari tabel tersebut di atas capaian indikator kinerja pada Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 sesuai rilis data hasil evaluasi Tim Itjen Kemendagri dan KPK serta Kemenpan IRB yakni 77,75. Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya tahun 2023 sebesar 69,61.

Dibawah ini, capaian MCP *(Monitoring Center for Prevention)* Pemerintah Provinsi Gorontalo yang bertujuan untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan yang

bersih dan transparan, sebagaimana pada tabel 3.6 berikut ini nampak perbandingan tahun 2023 dan tahun 2024.

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian MCP Pemerintah Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 – 2024

Area Intervensi	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)
Perencanaan dan Penganggaran APBD	73,88	85,41
Pengadaan Barang dan Jasa	100	81,77
Pelayanan Publik	100	100
Pengawasan APIP	65,20	73,40
Manajemen ASN	83,93	88,78
Optimalisasi Pajak Daerah	73,69	57,74
Pengelolaan BMD	73,01	78,94

Hasil penilaian terhadap seluruh komponen kinerja di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo memperoleh nilai sebesar 79,86% dengan predikat BB (Sangat Baik), namun masih perlu banyak perbaikan dalam komitmen manajemen kinerja. Hasil penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Hasil Penilaian Akuntabilitas Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 – 2024

Area Intervensi	Bobot	Tahun 2023	Tahun 2024
Perencanaan Kinerja	30	24,30	24,30
Pengukuran Kinerja	30	26,40	26,40
Pelaporan Kinerja	15	10,65	10,65
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,50	18,50
Jumlah	**100**	**79,86**	**79,86**

C. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah (RPD 2023-2026) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Berikut perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target RPD yang terdapat dalam dokumen perencanaan Tahun 2023-2026, dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target RPD 2023-2026

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir RPD	Capaian (%)	Kriteria/ Kode
Terwujudnya *Good and Clean Govenment*	Nilai MCP	94,10	98,51	81,70	
	Indeks Reformasi Birokrasi	77,75	78,00	99,67	

Dari tabel tersebut di atas capaian dari indikator kinerja nilai MCP dan indeks reformasi birokrasi Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan target RPD pada tahun 2024 ini capaian kinerjanya sebesar 81,70% dan 99,67% dengan kriteria sangat baik.

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah tersebut capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja sasaran startegis dibandingkan dengan target Renstra dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo sampai dengan Tahun 2024 dalam Dokumen Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d Tahun 2024	Persentase %	Kriteria/ Kode
Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintah OPD	Jumlah Fungsional Auditor dan PPUPD yang Bersertifikat Profesi	2	2	100	
	Nilai LKIP Inspektorat	BB	BB	100	
Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kualitas Pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	100	
	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	100	
	Manajemen Risiko Indeks	Level 3	Level 3	100	
	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Level 3	Level 2	66,7	

Dari tabel tersebut di atas capaian dari indikator kinerja sasaran strategis Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo samapai dengan Tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir renstra adalah sebagai berikut :

- Sebanyak 5 (lima) indikator kinerja capaiannya telah sesuai dengan target
- Masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang belum memenuhi target dalam kategori sedang

Terdapat 1 (satu) indiaktor kinerja yang belum memenuhi target akhir renstra yakni Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi hanya mencapai 66,7% dan hal ini dikarenakan aspek penerapan strategi pencegahan yaitu asesmen dan mitigasi risiko korupsi, dimana penilaian risiko yang dilaksanakan oleh OPD menggunakan skala risiko dengan beberapa kriteria penilaian diantaranya kerugian keuangan negara yang merupakan salah satu delik korupsi, namun *risk register* yang disusun masih belum memuat mengenai risiko-risiko *fraud*. Serta saluran pelaporan yang efektif dan kredibel, dimana unit kerja menyelenggarakan sistem *whistleblowing internal* dan cukup berfungsi, secara umum sikap terhadap pelapor cukup positif dan niat *whistleblowing* pada tataran sedang. Pegawai tidak memanfaatkan saluran *whistleblowing* karena masih tidak percaya mekanisme perlindungan pelapor berjalan. Pegawai telah memahami keberadaan saluran *whistleblowing internal* karena telah dilakukan sosialisasi atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan *(WhistleBlowers System)* dan aplikasinya. Sikap pegawai terhadap tindakan pelapor cukup positif, namun belum dimanfaatkan karena tidak dapat diakses secara langsung oleh pegawai/stakeholder (terbatas).

D. Perbandingan antara Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional Hasil

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah, capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja tujuan strategis dibandingkan dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel 3.12 di bawah ini:

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo sampai dengan Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja	Standar Nasional	Persentase %	Kriteria/ Kode
Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintah OPD	Jumlah Fungsional Auditor dan PPUPD yang Bersertifikat Profesi	2	-	-	
	Nilai LKIP Inspektorat	BB	-	-	
Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kualitas Pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	100	
	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	100	
	Manajemen Risiko Indeks	Level 3	Level 3	100	
	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Level 3	Level 2	66,7	

Dari tabel tersebut di atas capaian dari indikator kinerja sasaran strategis pada tahun 2024 yaitu level kapabilitas APIP dan tingkat Maturitas SPIP dan manajemen risiko indeks capaian kinerjanya sangat tinggi yaitu 100%. Sedangkan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi masih 66,7%.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024. Program-program tersebut dilaksanakan oleh sekretariat dan masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah.

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator didukung oleh 2 Program utama dengan 4 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan yang telah terealisasi dalam pelaksanaannya. Lebih rinci diuraikan pada poin berikutnya, yaitu pada analisis efisiensi sumber daya. Dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala yang dihadapi, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dan beberapa hal yang perlu mendapat perbaikan, yaitu:

1) Perencanaan Kinerja Rencana Aksi telah dilakukan monitoring secara triwulan, telah dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya atas kinerja program dan kegiatan, namun belum seluruh target yang ada pada rencana aksi dilakukan evaluasi dan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
2) Pengukuran Kinerja

   Hasil pengukuran kinerja atas capaian target pada indikator sub kegiatan, indikator kegiatan dan indikator program dengan menggunakan teknologi informasi (aplikasi) belum digunakan dalam evaluasi proses kinerja secara berkala.
3) Pelaporan Kinerja

   Namun dokumen pelaporan belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja di level provinsi, Nasional/Internasional *(Benchmark Kinerja)*. Hal seharusnya menjadi salah satu bahan evaluasi pada Tahun 2023 dan menjadi bahan perbaikan dokumen perencanaan di Tahun 2024.
4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
   - Evaluasi akuntabilitas dilakukan secara langsung yang dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah belum menyajikan penggunaan teknologi informasi (aplikasi) untuk peningkatan kinerja secara efektif dan akuntabel setiap unit kerja dalam mencapai target pada indikator sub kegiatan, kegiatan ataupun program dan baru menggambarkan sebatas kinerja masing-masing SDM.

- Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum seluruhnya mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja realisasi dan efisiensi kinerja realisasi rencana aksi.

Peningkatan capaian indikator APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan efektivitas pengendalian internal di instansi pemerintah. Beberapa upaya yang bisa dilakukan meliputi:

(1) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Auditor Internal;

Meningkatkan kualitas dan profesionalisme auditor melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi lainnya. Hal ini akan mendukung efektivitas pengawasan yang lebih baik.

(2) Pemanfaatan Tekonologi Informasi;

Mengimplementasikan sistem informasi yang memadai untuk memantau, mengelola, dan mengevaluasi kinerja pengawasan dengan lebih efisien dan akurat.

(3) Penyusunan SOP yang jelas dan terstruktur;

Meningkatkan pemahaman tentang prosedur yang baku serta pengawasan yang lebih transparan melalui standarisasi prosedur operasional di setiap unit pemerintahan.

(4) Peningkatan Keterlibatan Pimpinan;

Melibatkan Pimpinan dalam setiap tahap pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab internal audit, tetapi juga menjadi bagian dari budaya organisasi.

(5) Evaluasi dan Tindak Lanjut Temuan;

Menyusun mekanisme untuk menindaklanjuti hasil audit atau temuan pengawasan, sehingga temuan tersebut benar-benar dilaksanakan dalam perbaikan dan pengendalian lebih lanjut.

(6) Kolaborasi dan kerjasama dengan Instansi Lain;

Mengoptimalkan kolaborasi APIP dengan instansi lain seperti BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan), BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), serta Lembaga pengawasan lainnya untuk mendukung tercapainya tujuan yang sama dalam pengawaan yang lebih efektif.

Dengan langkah-langkah tersebut, capaian indikator APIP dapat terus meningkat yang pada gilirannya akan mendukung terciptanya Pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan.

F. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia.

Pada tahun 2024 Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai pagu anggaran Rp. 23.103.771.324,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.700.375.875,- atau sebesar 98,25%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 403.395.539,- atau 1,75%.

Upaya efisiensi sumber daya manusia telah dilaksanakan diantaranya pelaksanaan penugasan dilakukan melalui desk dengan memanggil OPD untuk pelaksanaan aktifitas pengawasan. Selain itu untuk mempermudah pekerjaan sehingga cepat, tepat dan efisien yaitu dengan memanggil narasumber ahli baik itu dari jajaran pemerintahan maupun pihak lain terkait pelaksanaan tugas pengawasan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya per indikator sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Jumlah Fungsional Auditor dan PPUPD yang Bersertifikat Profesi
2) Nilai LKIP Inspektorat
3) Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
4) Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
5) Manajemen Risiko Indeks (MRI)
6) Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi

Tabel 3.11
Analisis Efisiensi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja 2024	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintah OPD	Jumlah Fungsional Auditor dan PPUPD yang Bersertifikat Profesi	100	95,71	Efisien
	Nilai LKIP Inspektorat	100	98,77	Efisien
Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kualitas Pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	100	99,04	Efisien
	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	100	99,71	Efisien
	Manajemen Risiko Indeks	100	97,43	Efisien
	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	66,7	99,25	Belum efisien

Berdasarkan data pada tabel di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo selama tahun anggaran 2024 telah melaksanakan program/kegiatan yang telah mencapai target dengan sangat baik yang termasuk dalam kategori efisien. Tetapi masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang belum mencapain target dan dalam kategori belum efisien.

G. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Program/kegiatan merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam mendukung pencapaian target kinerja. Baik pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo di dukung oleh kinerja program dan kegiatan dengan masing-indikator. Adapun program/kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

✓ Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kebutuhan administratif dan operasional dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah telah terpenuhi.

Indikator ini mencakup berbagai aspek, yaitu:

- Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- Administrasi keuangan dan kepegawaian
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Pemeliharaan barang milik daerah
- Penyediaan jasa penunjang seperti listrik, air, dan komunikasi

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Persentase (%
		Target (%)	Realisasi (%)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	- Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%

✓ Persentase Penyelesaian Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui akuntabilitas suatu pemerintah daerah adalah dengan melihat seberapa aktif pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini merupakan tugas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam mendorong Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk selalu menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Rekomendasi BPK adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya kepada entitas untuk melakukan perbaikan.

Tindak lanjut atas rekomendasi diperlukan untuk memperbaiki Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mewajibkan audit untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan.

Tabel 3.13
Capaian Persentase Kewajiban Setor yang telah ditindaklanjuti sejak 5 Tahun terakhir

Tahun	Persentase
2020	59,08
2021	25,71
2022	3,46
2023	6,96
2024	0,25

Sumber : Aplikasi SILET, 2025

Dengan melihat tabel diatas bahwa capaian persentase dari kewajiban setor berdasarkan hasil temuan BPK maupun APIP yang telah ditindaklanjuti sejak 5 tahun terakhir yaitu tahun 2020 telah mencapai 59,08%, tahun 2021 mencapai 25,71%, tahun 2022 mencapai 3,46%, tahun 2023 mencapai 6,96% dan tahun 2024 baru mencapai 0,25%.

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Program Penyelenggaraan Pengawasan Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Persentase (%
		Target (%)	Realisasi (%)	
Program Penyelenggaraan Pengawasan	- Persentase Penyelesaian Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK	80%	74,32%	92,9%
	- Persentase Penyelesaian Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP	90%	90%	100%

✓ Jumlah OPD Yang Menerapkan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan seluruh jajarannya memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan birokrasi

yang bersih, akuntabel, dan melayani melalui reformasi birokrasi. Bertujuan untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dari ZI ini, ada dua tahapan pencapaian utama:

- Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Predikat ini diberikan kepada unit kerja yang berhasil menerapkan:
  - Manajemen perubahan
  - Penataan tata laksana
  - Penataan sistem manajemen SDM
  - Penguatan pengawasan
  - Penguatan akuntabilitas kinerja
- Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), ini adalah level lanjutan dari WBK. Selain lima komponen di atas, unit kerja juga harus menunjukkan Penguatan kualitas pelayanan publik. Artinya, pelayanan harus cepat, transparan, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Secara sederhana, WBK fokus pada pencegahan korupsi, sedangkan WBBM menambahkan pelayanan publik yang prima sebagai syarat utama.

Penerimaan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) membawa dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai provinsi. Berikut beberapa dampak utamanya:

- Inovasi Layanan Publik Instansi yang meraih WBBM cenderung meluncurkan layanan berbasis teknologi informasi, seperti digitalisasi proses perizinan, sistem antrean online, dan aplikasi pengaduan masyarakat.
- Peningkatan Kepuasan Masyarakat Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menunjukkan tren peningkatan setelah instansi meraih WBBM. Contohnya, Kantor Otoritas Bandara Wilayah III mengalami lonjakan kepuasan setelah mengubah layanan PAS bandara menjadi daring.
- Budaya Kerja yang Lebih Profesional dan Akuntabel. Predikat WBBM mendorong perubahan pola pikir ASN menjadi lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan prima.
- Efisiensi dan Transparansi Proses administrasi menjadi lebih cepat dan efisien, serta lebih minim potensi penyimpangan karena adanya sistem pengawasan internal dan *whistleblowing* yang aktif.

- Replikasi dan Inspirasi bagi Instansi Lain Instansi berpredikat WBBM sering dijadikan model atau mentor bagi unit kerja lain yang sedang membangun Zona Integritas.

Beberapa OPD di Provinsi Gorontalo yang telah secara resmi meraih predikat WBK/WBBM atau sedang dalam tahap pencapaian dengan komitmen kuat antara lain:

1) UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Diskumperindag Provinsi Gorontal Telah mencanangkan dan membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM sejak 2022, menjadi pelopor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Gorontalo

   Menandatangani komitmen pembangunan ZI WBK/WBBM pada 1 April 2024 dan aktif meningkatkan kualitas layanan publik berbasis integritas

Sebagian besar OPD di Provinsi Gorontalo masih dalam tahap pencanangan dan pembangunan zona integritas. Pemerintah Provinsi terus mendorong agar seluruh OPD mengikuti jejak ini demi memperkuat birokrasi yang bersih dan melayani.

Tabel 3.15
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Persentase (%
		Target (%)	Realisasi (%)	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	- Jumlah OPD Yang Menerapkan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM	2 OPD	2 OPD	100%

3.2. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja tahun 2024 untuk mewujudkan pelaksanaan 3 program dalam menunjang keberhasilan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2024 sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo sebesar **Rp 21.326.771.324,-** (Dua Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah). Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) untuk Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2024 sebesar **Rp 23.103.771.324,-** (Dua Puluh Tiga Miliar Seratus Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah). Dan realisasi dari penggunaan anggaran tersebut sebesar **98,25%** dan realisasi kinerja

sebesar 100%, yang diarahkan untuk mencapai hasil optimal dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah dialokasikan pagu APBD sebesar Rp 19.012.602.424,- yang diarahkan untuk mendukung capaian hasil dari indikator Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi yang menjadi Indikator utama dari Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo.

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator didukung oleh 2 Program utama dengan 4 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan yang telah terealisasi dalam pelaksanaannya, yaitu:

I. Program Penyelenggaraan Pengawasan meliputi:
   1.1. Kegiatan Penyelenggaran Pengawasan Internal dengan 6 Sub Kegiatan;
      1.1.1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Rp 453.699.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 453.698.300,- (99,99%).
      1.1.2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Rp 219.528.200,- dengan realisasi penyerapan Rp 218.920.488,- (99,72%).
      1.1.3. Reviu Laporan Kinerja Rp 528.940.000,- dengan realisasi keuangan Rp 528.304.015,- atau 99,88%.
      1.1.4. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota Rp 222.280.100,- dengan realisasi keuangan Rp 222.114.718,- atau 99,93%.
      1.1.5. Kerjasama Pengawasan Internal dengan pagu Rp 400.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp 398.831.647,- atau 99,71%.
      1.1.6. Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan pagu anggaran Rp 375.446.325,- dengan realisasi Rp 356.828.921,- atau 95,04%.
   1.2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu didukung 1 sub kegiatan yaitu:
      1.2.1. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Rp 462.922.875,- dengan realisasi keuangan Rp 459.434.251,- atau 99,25%.

II. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
   2.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan 1 sub kegiatan:
      2.1.1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dengan pagu anggaran Rp 209.790.000 dengan realisai Rp 209.173.445 atau sebesar 99,71%.
   2.2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan 4 sub kegiatan:

2.2.1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Rp 381.282.650,- realisasi keuangan Rp 360.854.980,- atau 94,64%.

2.2.2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Rp 140.138.000,- realisasi keuangan Rp 139.854.341,- atau 99,82%.

2.2.3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Rp 380.994.600,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 371.447.657,- (97,49%).

2.2.4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan pagu anggaran Rp. 316.146.750,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 315.117.111,- (99,67%).

Dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Realisasi anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.16
Serapan Anggaran Belanja Tahun 2024

Uraian	APBD Murni	APBD Perubahan	Realisasi Keuangan	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	**18,371,906,774**	**19,012,602,424**	**18,665,765,911**	**98.18**
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**230,275,425**	**259,098,775**	**255,914,298**	**98.77**
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	168,762,000	186,785,350	183,610,221	98.30
b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61,513,425	72,313,425	72,304,077	99.99
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**15,573,542,161**	**15,924,734,461**	**15,634,052,649**	**98.17**
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15,496,664,161	15,835,664,161	15,545,127,130	98.17
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40,562,000	52,754,300	52,722,159	99.94
c. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	36,316,000	36,316,000	36,203,360	99.69
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**412,060,550**	**415,060,550**	**397,239,018**	**95.71**
a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	412,060,550	415,060,550	397,239,018	95.71
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	**937,291,600**	**947,291,600**	**926,087,000**	**97.76**
a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	937,291,600	947,291,600	928,087,000	97.76
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**994,391,950**	**1,119,811,950**	**1,112,320,916**	**99.33**
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	241,249,350	248,248,650	244,881,565	98.64

b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	328,107,600	352,548,300	351,706,886	99.76
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	425,035,000	519,015,000	515,732,465	99.37
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**224,345,088**	**346,605,088**	**340,152,030**	**98.14**
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61,750,000	64,750,000	58,427,630	90.24
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,150,000	44,410,000	44,316,000	99.79
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	137,445,088	237,445,088	237,408,400	99.98
Program Penyelenggaraan Pengawasan	**1,866,801,700**	**2,662,816,900**	**2,638,132,340**	**99.07**
1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**1,571,712,825**	**2,199,894,025**	**2,178,698,089**	**99.04**
a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	338,683,400	453,699,400	453,698,300	100
b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	44,523,000	219,528,200	218,920,488	99.72
c. Reviu Laporan Kinerja	415,840,000	528,940,000	528,304,015	99.88
d. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	187,680,100	222,280,100	222,114,718	99.93
e. Kerjasama Pengawasan Internal	300,000,000	400,000,000	398,831,647	99.71
f. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	284,986,325	375,446,325	356,828,921	95.04
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**295,088,875**	**462,922,875**	**459,434,251**	**99.25**
a. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	295,088,875	462,922,875	459,434,251	99.25
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	**1,088,062,850**	**1,428,352,000**	**1,396,477,534**	**97.77**
3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**204,840,000**	**209,790,000**	**209,173,445**	**99.71**
a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	204,840,000	209,790,000	209,173,445	99.71
4. Pendampingan dan Asistensi	**883,222,850**	**1,218,562,000**	**1,187,304,089**	**97.43**
a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	252,140,000	381,282,650	360,854,980	94.64
b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	140,138,000	140,138,000	139,854,341	99.82
c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	219,254,100	380,994,600	371,447,657	97.49
d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	271,690,750	316,146,750	315,117,111	99.67
J U M L A H		**23,103,771,324**	**22,700,375,875**	**98.25**

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo 2024

Adapun anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.17
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024

Anggaran	2024			
	Target	Realisasi	Sisa	%
Belanja Pegawai	15,835,664,161	15,545,127,130	290,537,031	98.17
Belanja Barang dan Jasa	6,511,071,163	6,419,348,755	91,722,408	98.59
Belanja Modal	757,036,000	735,900,000	21,136,000	97.21

Sumber : LRA Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo 2024

Realisasi keuangan dari masing-masing program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18
Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Program pada Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Sasaran Program	Pagu Anggaran	Target	Realisasi Keuangan			
	2024		2023		2024	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintah OPD						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.012.602.424	100	16.638.812.290	96,06	18.665.765.911	98,18
Sasaran 2 : Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kualitas Pengawasan						
Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.662.816.900	100	2.378.006.891	99,85	2.638.132.340	99,07
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.428.352.000	100	1.272.894.702	99,09	1.396.477.534	97,77
Jumlah	23.103.771.324		20.289.713.883	96,68	22.700.375.875	98,25

Penyerapan anggaran sebagaimana pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efektif dalam mencapai tujuan dan indikator yang ditetapkan, hal ini mencerminkan penggunaan dana yang relativ baik.

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo pada Tahun Anggaran 2024 yang merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, sasaran strategisnya mencapai keberhasilan berkat kerja sama dari semua pihak, diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Hasil laporan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi GorontaloTahun 2024 dapat disimpulkan bahwa analisis sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintah OPD" dan "Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kualitas Pengawasan" dengan masing-masing indikator kinerja mencapai kinerja 100% atau TERCAPAI.

Selama ini Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo terus berupaya meningkatkan nilai Kapabilitas APIP dan nilai Reformasi Birokrasi, dalam hal ini selaku assessor telah melakukan :

1. Meningkatkan pengembangan kompetensi APIP melalui bimtek/pelatihan/kediklatan/ workshop/ sosialisasi;
2. Menempatkan diri sebagai *partner strategic* OPD dalam rangka memaksimalkan fungsi *consulting* yang mengawal ketercapaian sasaran strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo;
3. Penataan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur, baik auditor maupun pihak manajemen, dan pengupayaan rapat koordinasi disela-sela kesibukan *mandatory* menjadikan kegiatan audit dapat terlaksana;
4. Peningkatan kualitas Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko, dengan menetapkan dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko yang telah mempertimbangkan hasil penilaian resiko pada seluruh OPD;
5. Peningkatan kualitas audit kinerja sehingga dapat menilai aspek ekonomis, efisien dan efektivitas atas pelaksanaan program strategis dengan mempertimbangkan hasil penilaian resiko pada masing-masing OPD;
6. Berkoordinasi secara intens dengan institusi pembina dalam rangka pencapaian kapabilitas APIP dan kinerja Inspektorat Daerah;

Adapun langkah-langkah yang diambil oleh Inspektorat Daerah dan upaya tindak lanjut untuk meningkatkan nilai Kapabilitas APIP dan Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dengan menyusun rencana aksi, diantaranya :

1. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan yang berbasis pada Perencaan Berbasis Risiko.
2. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang menunjang ketercapaian kapabilitas APIP secara berkala.
3. Koordinasi yang semakin intens dan berkala dengan BPKP Perwakilan Gorontalo selaku Instansi Pembina Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan OPD auditan dalam rangka ketercapaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.
5. Melaksanakan penilaian resiko strategis OPD dan mengawal OPD dalam rangka meminimalisir risiko.
6. Melakukan audit kinerja secara *current period* untuk memperbaiki tata kelola, pengendalian intern dan pengelolaan resiko pada OPD, serta mencegah terjadinya penyimpangan.
7. Menyusun rencana kerja reformasi birokrasi di lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo dan mensosialisasikan kepada seluruh pegawai.
8. Melaksanakan rencana aksi dengan didasari komitmen bersama oleh seluruh pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo ini dibuat, dengan harapan segala kritikan dan saran yang positif sangat diharapkan demi perbaikan serta penyempurnaan ditahun-tahun yang akan datang. Terima kasih.

Gorontalo, 2025

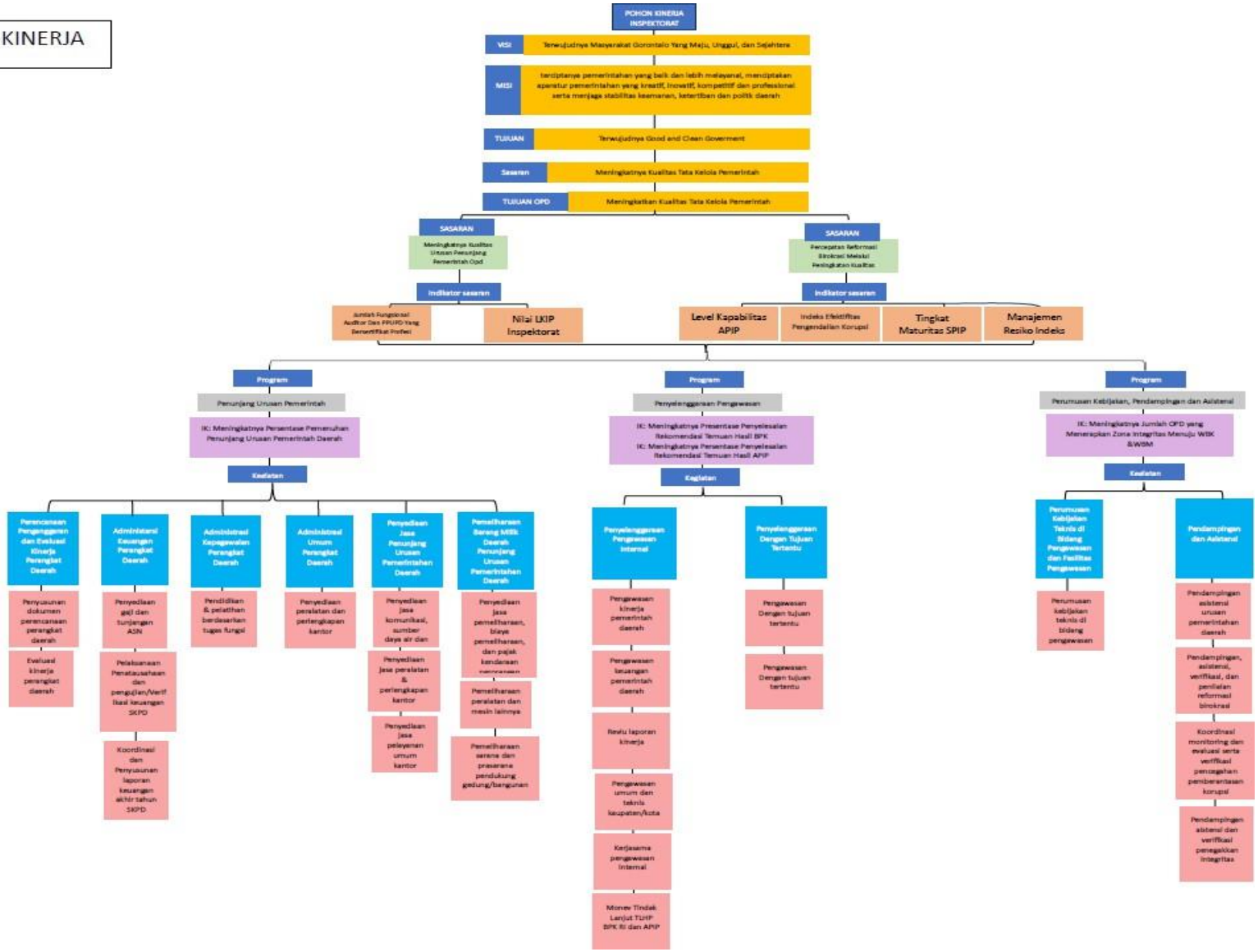
I N S P E K T U R

Ditandatangani secara elektronik oleh :
INSPEKTUR

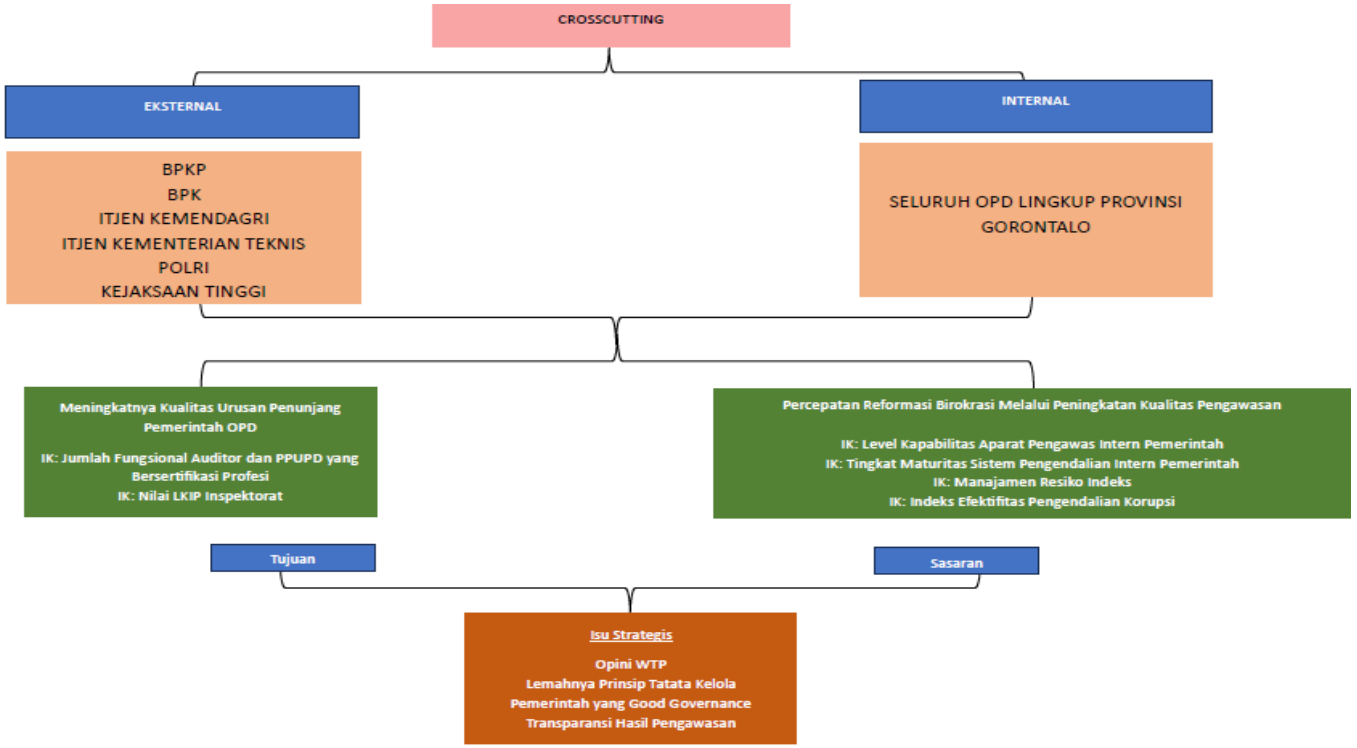
ZUKRI SUROTINOJO, AP, M.Ec.Dev

yang diterbitkan oleh BSrE.

POHON KINERJA



CROSSCUTTING



STAKEHOLDER	CROSSCUTTING
Seluruh OPD lingkup provinsi Gorontalo	Pelaksanaan pengawasan, pendampingan dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan
Pemerintah Kabupaten/kota	Terlaksananya kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
BPKP	Peningkatan kapabilitas APIP, maturitras SPIP dan peningkatan Kompetensi SDM Auditor
BPK	Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI
ITJEN KEMENDAGRI	Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan peningkatan SDM PPUPD
ITJEN Kementerian Teknis	Pelaksanaan pengawasan teknis dan tindak lanjut hasil pengawasan kementerian teknis
POLRI	Koordinasi hasil pengawasan dan pelaksanaan kegiatan *cyber* pungli
Kejaksaan Tinggi	Koordinasi hasil pengawasan dan pendampingan pelaksanaan program strategis pemda
KPK RI	Koordinasi terkait pelaksanaan MCP dan Stranas PK

CASCADING



PROGRAM	ANGGARAN
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 17.320.379.580
IK: Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	
2. Penyelenggaran Pengawasan	Rp. 2.381.539.700
IK: Persentase penyelesaian rekomendasi temuan hasil BPK IK: Persentase penyelesaian rekomendasi temuan hasil APIP	
3. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan asistensi	Rp. 1.284.510.830
IK: Jumlah OPD yang menerapkan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	

KEGIATAN	ANGGARAN
1.1 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp. 191.434.700
1.2 Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp. 14.562.862.334
1.3 administrasi kepegawaian perangkat daerah	Rp. 636.545.400
1.4 Administrasi umum perangkat daerah	Rp. 417.731.634
1.5 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Rp. 905.537.512
1.6 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 606.267.000
2.1 Penyelenggaraan pengawasan internal	Rp. 2.073.869.200
2.2 Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Rp. 307.670.500
3.1 Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Rp. 151.005.430
3.2 Pendampingan dan Asistensi	Rp. 1.133.505.400

KEGIATAN	ANGGARAN
1.1.1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp. 119.528.000
1.1.2 Evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp. 71.906.70
1.2.1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp. 14.485.985.334
1.2.2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Rp. 40.562.000
1.2.3. Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD	Rp. 36.316.000
1.3.1 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Rp. 636.545.400
1.4.1 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 417.731.634
1.5.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 240.716.012
1.5.2 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 218.996.500
1.5.3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp. 445.825.000
1.6.1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan	Rp. 74.250.000
1.6.2 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp. 71.250.000
1.6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya	Rp. 460.767.000
2.1.1 Pengawasan kinerja pemerintahan daerah	Rp. 519.278.600
2.1.2 Pengawasan keuangan pemerintahan daerah	Rp. 171.444.800
2.1.3 Reviu laporan kinerja	Rp. 435.799.400
2.1.4 Pengawasan umum dan teknis kabupaten/kota	Rp. 273.122.900
2.1.5 Kerjasama pengawasan internal	Rp. 376.957.000
2.1.6 Monitoring evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK & APIP	Rp. 297.266.500
2.2.1 Pengawaasn dengan tujuan tertentu	Rp. 307.670.500
3.1.1 Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan	Rp. 151.005.430
3.2.1 Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Rp. 301.868.000
3.2.2 Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	Rp. 140.136.000
3.2.3 Koordinasi Monitoring Evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantas korupsi	Rp. 414.528.300
3.2.4 Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Rp. 276.973.100